

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Kartu Program Sembako Dibagikan

Bukitiggi, Padek – Pemerintah Kota (Pemko) Bukitiggi melalui Dinas Sosial, kembali menyerahkan kartu program sembako untuk warga yang masuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kartu itu, di beberapa kelurahan, Rabu (29/4).

Wali Kota Bukitiggi, Ramlan Nurmatias menyebutkan, bantuan program sembako ini merupakan transformasi dari program BPNT. Dimana program sembako ini sudah dimulai sejak Januari lalu.

“Untuk Bukitiggi, jumlah yang masuk BPNT terdata sebanyak 2.222 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Karena ada wabah Covid-19 ini, ada perluasan (penambahan) dari Kemensos sebanyak 223 RTS, sehingga saat ini jumlah penerima bantuan program sembako di Bukitiggi ini berjumlah 2.445 RTS,” jelasnya didampingi Kadis Sosial, Linda Faroza.

Untuk kriteria penerima, sebut Wako, warga yang 30 persen berpenghasilan terendah dalam DTKS atau desil 3 ke bawah. Sehingga memang benar-benar membutuhkan dan dibantu melalui kerjasama pemerintah pusat dengan BRI.

“Setiap bulan, mereka dibantu secara non tunai, untuk memenuhi pangan, Melalui kartu itu, untuk memenuhi pangan. Melalui kartu itu, penerima bisa berbelanja di *e-warung* yang telah ditentukan untuk membeli beras, bisa juga memilih baik itu ayam ataupun daging, sayur dan pangan lainnya seharga Rp200 ribu rupiah per bulan. Semoga ini bisa membantu mereka, apalagi ditengah wabah Covid-19 ini,” tukas Ramlan. (Stg)

Sumber Berita : Padang Ekspres, Sabtu, 30 April 2020

Catatan Berita :

- Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan program transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program BPNT telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus diperluas ke wilayah-wilayah lainnya sampai saat ini. Kartu sembako ini adalah program agar rakyat miskin bisa terbantu saat memenuhi kebutuhan bahan kehidupan keseharian.
- Kartu sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan kepada masyarakat agar punya akses terhadap pangan yang bergizi.
- Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan.
- Untuk mendapatkan Kartu Sembako Murah tersebut, masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana ditulis dalam situs OJK. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:
 1. Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten.
 2. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan.
 3. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke *e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.
- Pengawasan pelaksanaan penyaluran BPNT dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan perbankan, agen bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dalam langkah sebagai berikut :
 1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Program BPNT di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program BPNT.
 2. Kegiatan pemantauan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program BPNT pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.

3. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin dan berkala. Pemantauan rutin melalui dashboard BPNT, rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Sedangkan pemantauan berkala berupa kegiatan uji petik (spotcheck) oleh tim lintas K/L dan daerah.
 4. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya. e. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Pengendali dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dapat dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan.
 5. Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali.
 6. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program BPNT dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
 7. Sistem Informasi Manajemen (SIM) penyaluran BPNT berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pemantauan pelaksanaan penyaluran dari waktu ke waktu. i. Pemantauan pelaksanaan Program BPNT pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran sebagai panduan.
 8. Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali.
- Pelaporan pelaksanaan Program BPNT ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.